



# SKRIPSI

**Judul:**

TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT ATAS  
DIPEKERJAKANNYA TENAGA KESEHATAN YANG BELUM  
MEMPUNYAI  
SURAT TANDA REGISTRASI

**Disusun oleh:**

MARIA IBELLA VIANKA  
NIM. 205192002

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2024

**TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT ATAS  
DIPEKERJAKANNYA TENAGA KESEHATAN YANG BELUM  
MEMPUNYAI SURAT TANDA REGISTRASI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Maria Ibella Vianka  
NIM : 205192002

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2024**

## Pengesahan

Nama : MARIA IBELLA VIANKA  
NIM : 205192002  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT ATAS  
DIPEKERJAKANNYA TENAGA KESEHATAN YANG  
BELUM MEMPUNYAI SURAT TANDA REGISTRASI  
Title : THE HOSPITAL'S LEGAL RESPONSIBILITY FOR THE  
EMPLOYMENT OF HEALTH PERSONNEL WHO DOES  
NOT HAVE A REGISTRATION LETTER

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM  
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 17-Januari-2024.

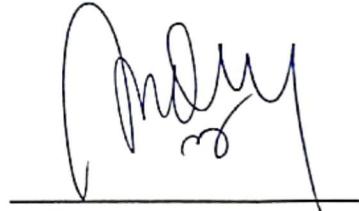
**Tim Penguji:**

1. YUWONO PRIANTO, S.H., M.H.
2. ANDRYAWAN, S.H., M.H.
3. MOODY RIZQY SYAILENDRA P., S.H.,M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

**Pembimbing:**

ANDRYAWAN, S.H., M.H.  
NIK/NIP: 10215006



Jakarta, 17-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

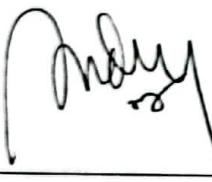
## Persetujuan

Nama : MARIA IBELLA VIANKA  
NIM : 205192002  
Program Studi : HUKUM  
Judul : TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT ATAS  
DIPEKERJAKANNYA TENAGA KESEHATAN YANG  
BELUM MEMPUNYAI SURAT TANDA REGISTRASI

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 20-Desember-2023

Pembimbing:  
ANDRYAWAN, S.H., M.H.  
NIK/NIP: 10215006



---

## **ABSTRAK**

Mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik merupakan hak bagi setiap manusia. Rumah sakit sebagai institusi penyedia layanan kesehatan wajib memperhatikan setiap aspek penyelenggaraan kesehatan termasuk sumber daya manusia yang bekerja di dalamnya. Sumber daya manusia ini diwajibkan memiliki kompetensi dalam mendukung terselenggaranya pelayanan kesehatan di Indonesia sesuai dengan profesiya masing-masing. Perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan. Setiap perawat wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang merupakan syarat mutlak bagi setiap perawat. STR merupakan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Konsil Keperawatan guna membuktikan bahwa seorang perawat telah terregistrasi dan memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan tindakan medis di institusi pelayanan kesehatan. Apabila kewajiban tersebut dilanggar, maka dapat diartikan bahwa ketentuan dalam hukum positif juga sudah dilanggar. Kajian dalam skripsi ini bermaksud untuk menganalisis dan mengevaluasi mengenai pertanggungjawaban pihak rumah sakit atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak memiliki STR. Selain itu, skripsi ini juga dimaksudkan untuk menganalisis dan mengevaluasi kedudukan dari Konsil Keperawatan dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) ketika ditemukannya kelalaian yang dilakukan oleh perawat. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bertumpu pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan didukung oleh data wawancara. Hasil yang didapat dari penelitian skripsi ini adalah bahwa menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit tidak diatur secara spesifik mengenai pertanggungjawaban rumah sakit terhadap kelalaian yang dilakukan oleh perawat yang dipekerjakannya. Namun, sejak tanggal 8 Agustus 2023 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Menurut Pasal 442 dan 448 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tersebut ditentukan bahwa rumah sakit dapat dibebankan pertanggungjawaban atas kerugian/kesalahan yang diakibatkan oleh setiap orang yang dipekerjakan oleh rumah sakit (termasuk tenaga kesehatan/perawat). Dalam hal terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan/perawat, maka Konsil Keperawatan dan PPNI memiliki peran untuk menindaklanjuti laporan atau pengaduan perihal adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perawat.

Kata Kunci: Perawat, Surat Tanda Registrasi, Pertanggungjawaban Rumah Sakit

## **ABSTRACT**

*Getting good health services is a right for every human being. Hospitals as health service providers are obliged to pay attention to every aspect of health delivery, including the human resources who work in them. These human resources are required to have competence in supporting the implementation of health services in Indonesia according to their respective professions. Nurses are one of the health workers who have an important role in providing health services. Every nurse is required to have a Registration Certificate (RC) which is an absolute requirement for every nurse. STR is written evidence issued by the Nursing Council to prove that a nurse has been registered and has the competence to carry out medical procedures in health service institutions. If this obligation is violated, it can be interpreted that the provisions of positive law have also been violated. The study in this thesis aims to analyze and evaluate the hospital's liability for negligence committed by health workers who do not have STR. Apart from that, this thesis is also intended to analyze and evaluate the position of the Nursing Council and the Indonesian National Nurses Association (PPNI) when negligence was discovered by nurses. The method used in this thesis is a normative legal research method which relies on primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials and is supported by interview data. The results obtained from this thesis research are that according to Law no. 44 of 2009 concerning Hospitals does not specifically regulate the responsibility of hospitals for negligence committed by the nurses they employ. However, since August 8 2023 Law no. 44 of 2009 has been revoked and replaced with Law No. 17 of 2023 concerning Health. According to Articles 442 and 448 of Law No. 17 of 2023, it is determined that hospitals can be held responsible for losses/mistakes caused by anyone employed by the hospital (including health workers/nurses). In the event of negligence committed by health workers/nurses, the Nursing Council and PPNI have a role in following up on reports or complaints regarding violations committed by nurses.*

*Key Words: Nurse, Registration Certificate, Hospital Accountability*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Adapun judul Skripsi ini adalah “Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Atas Dipekerjakannya Tenaga Kesehatan Yang Belum Mempunyai Surat Tanda Registrasi”. Dalam penulisan skripsi ini Penulis banyak memperoleh bimbingan, pengarahan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy S.H., M.A, LL.M. selaku Sekretaris Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Andryawan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak menuntun dan memberikan masukan dari awal penulisan skripsi ini dibuat;
5. Para Narasumber dalam mendukung proses penulisan skripsi ini yaitu Ibu Ns. Retno Murtiningsih, S.Kep selaku Koordinator Satuan Pelaksana Pemberdayaan Pegawai RSUD Koja; Ibu Anisa Yusriana, S.H. selaku Legal Kepegawaian RSUD Cengkareng; Bapak Dr. Untung Sujianto, SKP., M.Kes. selaku Ketua Divisi Registrasi Konsil Keperawatan; dan Ibu Elly Marlina sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum PPNI Tangerang Selatan;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Orang Tua dan teman-teman Penulis yang telah memberikan dukungan secara moril dan materiil.

Dalam menyelesaikan skripsi ini Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian skripsi ini dan Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak yang membacanya.

Jakarta, 17 Januari 2024

Penulis

Maria Ibella Vianka

## Pernyataan

Nama : MARIA IBELLA VIANKA  
NIM : 205192002  
Program Studi : HUKUM  
Judul : TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT ATAS  
DIPEKERJAKANNYA TENAGA KESEHATAN YANG  
BELUM MEMPUNYAI SURAT TANDA REGISTRASI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20-Desember-2023  
Yang menyatakan



MARIA IBELLA VIANKA  
NIM. 205192002

## DAFTAR ISI

<b>Cover Luar .....</b>	i
<b>Cover Dalam .....</b>	ii
<b>Pengesahan .....</b>	iii
<b>Persetujuan .....</b>	iv
<b>Abstrak .....</b>	v
<b>Kata Pengantar .....</b>	vii
<b>Pernyataan .....</b>	ix
<b>Daftar Isi .....</b>	x
<b>Daftar Tabel .....</b>	xii
<b>Daftar Skema .....</b>	xiii
<b>Daftar Singkatan .....</b>	xiv
<b>Daftar Lampiran .....</b>	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II KERANGKA TEORETIS .....</b>	17
A. Rumah Sakit.....	17
B. Perawat.....	21
C. Pasien .....	25
D. Standar Pelayanan.....	28
E. Konsil Keperawatan .....	28
F. Organisasi Profesi Perawat.....	29
G. Surat Tanda Registrasi .....	30
H. Pelanggaran Rumah Sakit.....	31
I. Pertanggungjawaban Pengganti .....	31

<b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN .....</b>	34
A. Catatan Hasil Wawancara dengan RSUD Koja .....	34
B. Catatan Hasil Wawancara dengan RSUD Cengkareng.....	37
C. Catatan Hasil Wawancara dengan Konsil Keperawatan.....	39
D. Catatan Hasil Wawancara dengan PPNI.....	41
E. Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN . Mbo .....	45
<b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN .....</b>	52
A. Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Pasien Sebagai Korban Kelalain Medis yang Dilakukan oleh Perawat yang Tidak Memiliki Surat Tanda Registrasi Berdasarkan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan .....	52
B. Kedudukan Konsil Keperawatan dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dalam Penyelesaian Sengketa Medis yang Melibatkan Perawat .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
<b>Daftar Pustaka .....</b>	76
<b>Lampiran</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1	Rumah Sakit Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan.....	17
Tabel 4.2	Perawat Menurut Undang-Undang Keperawatan dan Undang- Undang Omnibus Law Kesehatan.....	22
Tabel 4.3	Pasien Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan .....	25
Tabel 5.1	Pengaturan Tenaga Keperawatan Menurut Undang-Undang Keperawatan dan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan....	55
Tabel 5.2	Tanggung Jawab Rumah Sakit Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan .....	65
Tabel 5.3	Pelanggaran dan Sanksi Terhadap Rumah Sakit Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan .....	65

## **DAFTAR SKEMA**

Skema 1.1 Kerangka Konsep Penelitian Penulis .....	10
--	----

## **DAFTAR SINGKATAN**

AD/ART	Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
BBHP	Badan Bantuan Hukum Perawat
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BTLS	<i>Basic Trauma Life Support</i>
CV	<i>Curriculum Vitae</i>
D3	Diploma Tiga
DPD	Dewan Pengurus Daerah
DPK	Dewan Pengurus Komisariat
DPP	Dewan Pengurus Pusat
DPW	Dewan Pengurus Wilayah
HFIS	<i>Health Facilities Information System</i>
ICU	<i>Intensive Care Unit</i>
IGD	Instalasi Gawat Darurat
KLB	Kejadian Luar Biasa
KOP	Kartu Obat Pasien
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KTU	Kepala Tata Usaha
MKEK	Majelis Kehormatan Etik Keperawatan
MTKI	Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia
NIK	Nomor Induk Kependudukan
NIRA	Nomor Induk Registrasi Anggota
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
PPNI	Persatuan Perawat Nasional Indonesia
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
SIM	Surat Izin Mengemudi
SIP	Surat Izin Praktik

SKP	Sistem Kredit Prestasi
SOP	<i>Standard Operating Procedure</i>
STR	Surat Tanda Registrasi
UDHR	<i>Universal Declaration of Human Rights</i>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing
- Lampiran 3 Rekap Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Turnitin dan Hasilnya
- Lampiran 5 Bukti Publikasi Jurnal
- Lampiran 6 Pernyataan Hasil Wawancara di RSUD Koja, Jakarta
- Lampiran 7 Pernyataan Hasil Wawancara di RSUD Cengkareng, Jakarta
- Lampiran 8 Pernyataan Hasil Wawancara di Konsil Keperawatan, Jakarta
- Lampiran 9 Pernyataan Hasil Wawancara melalui *zoom meeting* dengan PPNI, Tangerang Selatan
- Lampiran 10 Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo